



LAKIP 2021

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan anugrahnya sehingga Dinas *Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah berhasil* menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021.

Penyusunan Laporan ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada.

Pertanggungjawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai cita, citra dan harapan terciptanya sebuah tata kelola keuangan yang sejalan dengan itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah memenuhi kewajiban yang diamanatkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun anggaran 2021, Dinas komunikasi dan Informatika Kota Makassar melaksanakan kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif, analisis kebijakan serta kegiatan pengembangan dengan tujuan memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan. Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh sub.bag Keuangan serta Sekretariat dan seluruh jajaran bidang yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga ikut membantu dalam proses pembuatan LAKIP ini.

Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan priode yang akan datang. Disamping itu juga LAKIP dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyusun dokumen LAKIP ini.

Makassar, 21 Februari 2022

**Kepala Dinas Komunikasi
Dan Informatika Kota Makassar**



Mahyuddin, S.STP., M.A.P
Pangkat: Pembina Tk. I
Nip.19781224 1997111 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. <i>TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....</i>	2
B. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS.....	2
C. RENCANA STRATEGIS	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. <i>CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</i>	16
1. <i>SEKERTARIAT.....</i>	16
2. <i>INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</i>	18
3. <i>APLIKASI INFORMATIKA</i>	21
4. <i>PENGOLAHAN DATA ELAKTRONIK</i>	23
5. <i>PERSANDIAN</i>	26
B. <i>REALISASI ANGGARAN.....</i>	28
BAB IV PENUTUP	28
A. <i>KESIMPULAN</i>	28
1. <i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</i>	28
2. <i>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK.....</i>	31
3. <i>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA.....</i>	32
4. <i>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</i>	33
5. <i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN</i>	34

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan suatu instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disingkat LAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyelenggaraan LAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan suatu laporan kinerja yang berkualitas dan selaras sesuai dengan tahapan-tahapan yang tertuang dalam dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dst.

Salah satu inti peraturan tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tujuannya adalah untuk mendorong tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Terwujudnya transparansi instansi pemerintah dan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini disebabkan dengan menerapkan LAKIP tersebut, setiap instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan datang.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis War Room Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika. Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika selaras dan siap mendukung misi III Restorasi Ruang Kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia "Sombere & Smart" City untuk Semua. Keterkaitan antara misi Pemerintah Kota Makassar dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Kota Makassar .
2. Peningkatan Pengunjung Tahunan Pada Website Pemerintah Kota Makassar
3. Peningkatan Data Tahunan Yang Ter-Update Pada Open Data Pemerintah Kota Makassar
4. Mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Yang Terhubung dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo
5. Melaksanakan layanan publik Yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
6. Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan
7. Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah
8. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
9. Melaksanakan keamanan informasi pemerintah

B. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan berkaitan dengan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tugas pokok dan fungsi di jabarkan sebagai berikut:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Perlunya penambahan sumber daya manusia Pegawai Negeri sehubungan memasuki purna bakti
- 2) Perlunya formasi dan pengisian jabatan perencanaan minimal 5 orang
- 3) Perlunya peningkatan kompetensi dan kemampuan atas sumber daya manusia
- 4) Usulan yang terkait program subbagian dan bidan pada kebutuhan dana yang sangat urgen belum terpenuhi
- 5) Adanya pergantian pejabat terkait mutasi jabatan sehingga perlu mempelajari kembali dokumen perencanaan yang ada sebelumnya sehingga mengakibatkan pejabat baru belum menguasai sepenuhnya dokumen sebelumnya
- 6) Sarana digitalisasi pengarsipan belum tersedia
- 7) Format permintaan data pada saat rekonsiliasi seringkali terjadi perubahan
- 8) Desiminasi terkait pelaporan evaluasi kinerja pada proses pengumpulan data masih lambat

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sumber daya manusia aparatur pemerintah yang tidak berlatarbelakang pendidikan akuntansi mengakibatkan pemahaman terhadap proses akuntansi tidak terlaksana
- 2) Masih banyak entitas pelaporan yang menganggap bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah dokumen rahasia
- 3) Banyak peraturan keuangan seringkali menyulitkan bagi aparatur untuk mengimplementasikannya. Belum tuntas pemahaman mengenai aturan yang terdahulu, disusul lagi dengan peraturan baru.
- 4) Perlunya sosialisasi serta sinkronisasi pada rekanan dan pemeriksa (inspektorat) agar adanya kesepahaman selanjutnya diadakan peningkatan kompetensi terhadap pencairan keuangan

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
 - 1) Belum terpenuhinya kebutuhan jabatan pelaksana sehingga yang terisi hanya 40 %
 - 2) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan fungsinya masih minim untuk pemenuhan anggaran dan pelatihan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan
 - 3) Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan masih terbatas dari anggaran yang telah ditetapkan dan spesifikasi kendaraan yang dibutuhkan harganya sangat mahal
 - 4) Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak operasional/lapangan untuk pengenaan pajaknya tidak menentu atau berfluktuasi dan ketidaktaatan pemegang kendaraan untuk melaporkan pada saat jatuh tempo pajak kendaraan yang dikuasainya
 - 5) Pemenuhan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan kantor terhadap pemenuhan anggaran sangat terbatas dan atas pemenuhan bangunan harus persetujuan dinas pekerjaan umum melalui sekretaris daerah Kota Makassar
 - 6) Penyediaan bahan logistik kantor pada untuk harga pada aplikasi tidak sesuai dengan harga dipasaran mengingat harga dipasaran berfluktuasi dan beberapa item yang akan dibelanjakan tidak terdapat di Aplikasi
2. Pada program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdapat Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan permasalahan sebagai berikut :
 - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terjadi masalah Inkonsistensi dan tidak adanya kontinuitas terkait visi penatalaksanaan dan pengawasan E-Government di kota Makassar sehingga beberapa pelaksanaan e-gov di

SKPD di kota Makassar masih berdasarkan pemahaman masing – masing, serta Minimnya pelatihan dalam peningkatan Kemampuan SDM dimana pelaksanaan EGovernment belum terpenuhi serta Lembaga yang seharusnya menaungi belum dibuat

- b. Pengelolaan Pusat Data di Pemerintah Kota Makassar belum maksimal, Integrasi dan pusat data belum terlaksana dengan baik dan Minimnya anggaran dan SDM untuk pelaksanaan pengelolaan pusat data.
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik terhadap data - data yang dimiliki oleh pemerintah kota makassar masih berdasarkan basis platform yang berbeda – beda, Sulit mengintegrasikan data yang berasal dari platform yang berbeda – beda, dan Kurangnya sumber daya manusia terkait pengembangan tentang koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik
- d. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik terhadap Aplikasi yang telah dibuat seringkali berbeda platform sehingga sulit dilakukan pengintegrasian, Belum ada SOP untuk pengembangan aplikasi di pemerintah kota Makassar dan beberapa SKPD melaksanakan pengembangan aplikasi dengan tidak melakukan koordinasi dengan diskominfo
- e. Sistem penghubung layanan pemerintah di kota makassar belum terlaksana dengan baik dan sesuai kemampuan pemerintah kota makassar dan kebutuhan masyarakat pada khususnya, Suprastruktur berupa regulasi masih kurang dalam mendukung Sistem Pemnghubung berbasis teknologi informasi dan belum ada wadah serta belum detailnya tata kelola tentang penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah
- f. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan Minimnya koordinasi dengan lembaga daerah atau kementerian terkait, Minimnya anggaran untuk pelaksanaan dan pengembangan terkait pengelolaan kota cerdas, dan belum terpenuhinya wadah untuk pelaksanaannya.
- g. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah terjadi kesemrawutan khususnya dalam hal infrastruktur, Belum ada rencana detail tentang pengembangan dan

pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah kota Makassar, dan Sumber daya Manusia dalam mengelola dan mengembangkan Teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah daerah sangat kurang.

3. Program Informasi Dan Komunikasi Publik tentang pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi masalah pokok Tidak adanya kajian dan riset mendalam untuk bisa merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi public dari unsur masalah Perlunya ditingkatkan SDM dan Sarana Prasarana agar menghasilkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan realita serta memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan, dan akar masalah Agar lebih efisien maka perlu diadakan Forum Group Discussion (FGD) yang menghadirkan Pejabat terkait dan tenaga ahli
 - b. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik pokok masalahnya Masih kesulitan melakukan monitoring Media Lokal Akibatnya kesulitan menentukan isu akar masalah pada Masih kurang sarana prasaran teknologi yang pendukung untuk melakukan pemantauan, apalagi media online dan media sosial semakin banyak dan berpengaruh.
 - c. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah pokok masalah pada Masih diperlukan kajian untuk menentukan tema prioritas untuk didistribusikan kepada media publik termasuk dalam pelaksanaan Program "Coffe Morning" yang menjadi masalah pada Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pemantauan isu yang dibahas oleh media yang jumlahnya cukup banyak sehingga akar masalahnya adalah Kendala teknis penyelenggaraan "Coffe Morning" dalam menghadirkan awak media
 - d. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik pokok masalahnya Masih kurangnya kreasi konten media yang dikelola, masalahnya terdapat pada www.makassarkota.go.id, buletin Makassar Info dan media sosial semakin kompetitif dan kreatif sesuai kebutuhan pulik di era djgital, maka diperlukan pengembangan kompetensi SDM dengan akar

masalah Belum dilajukannya perbandingan pengelolaan media di daerah lain maka perlu diadakan studi banding agar bisa dijadikan inspirasi pengembangan konten informatif dan terkini

- e. Pengelolaan Media Komunikasi Publik pokok masalah pada Mengingat pentingnya publikasi terkait program dan visi misi pemerintah sehingga dibutuhkan dukungan publikasi semua baik media cetak, tv, radio, on line dll dengan masalah Kerjasama dengan media cetak, elektronik dan media online masih belum maksimal sehingga akar masalahnya adalah kerjasama dengan media masih sangat perlu ditambahkan baik media cetak tv, radio, online dan lain sebagainya
- f. Pelayanan Informasi Publik mempunyai masalah pokok Masih adanya kendala teknis dalam penyelenggaraan event publik yakni, Pameran pembangunan Sulsel Ekspo, Dan beberapa penyelenggaraan Nasional Lainnya serta Data pada sistem Open data terkait informasi publik untuk semua OPD masih ada yang kurang melakukan up to date informasi public dengan masalah Seringkali terjadi kekurangan fasilitas dibidang komunikasi publik dan logistik media berupa penyediaan Wifi , Booth, dan konsumsi bagi insan media dan Koordinasi dan komitmen OPD untuk meng up to date data masih harus ditingkatkan dengan akar masalah Masih dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung teknis dan SDM pengelola Pengisian dashboard Open Data masih perlu mendapatkan pembinaan
- g. Layanan Hubungan Media dengan masalah pokok Mengingat peran media yang sangat besar dalam mendukung publikasi program pemerintah maka di butuhkan ruangan pers dan pertemuan khusus untuk menjalin hubungan baik yang menjadi masalah Masih belum adanya Ruang pers sebagai sarana bagi media dapat memperoleh press rilis yang di produksi oleh pemerintah kota Makassar dengan akar masalah Pertemuan dengan redaktur media yang dilakukan lewat Ruang Pers masih terkendala saran dan prasarana
- h. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan dengan pokok masalah Mengingat peran komunitas informasi dan komunikasi publik yakni Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk mendukung program dan visi-misi pemerintah kota Makassar maka dibutuhkan bimbingan teknis

sehingga masalahnya Bimbingan Teknis KIM masih perlu ditambahkan waktu dan kapasitas pesertanya, serta follow up semua peserta agar dapat berdaya secara efektif dengan akar masalah Masih terkendala pada teknis perencanaan kegiatan bimbingan teknis KIM

- i. Manajemen Komunikasi Krisis yang menjadi pokok masalah mengingat pentingnya pengelolaan isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Kota Makassar maka diperlukan pantauan khusus sehingga masalahnya terdapat pada Kajian khusus terkait pengelolaan dengan akar masalah terdapat pada Dibutuhkannya tim riset dan pengelola dalam menangani isu krisis.
- j. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik yang menjadi pokok masalah Diera digital termasuk dalam sektor Usaha UMKM, maka menjadi keniscayaan mempersiapkan SDM kelompok Usaha berbasis strurtup digital harus diadakan sehingga masalahnya Masih dibutuhkan sarana dan Prasarana pendukung untuk melakukan inkubasi terhadap UMKM berbasi strurtup digital dengan akar masalah Dibutuhkannya tim khusus dan ruangan khusus untuk melakukan inkubasi.
- k. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang menjadi pokok masalah Karena PPID Kota Makassar baru terbentuk maka perlu dilakukan pertemuan untuk membahas teknis fungsi PPID agar dapat efektif berjalan dengan masalah Pelaksanaan Fungsi PPID Utama dan PPID Pembantu masih harus disosialisasikan sehingga akar masalahnya adalah Dibutuhkan sara dan prasarana seperti ruang khusus untuk menerima permintaan dan laporan terkait informasi publik, mengadvokasi, dan mengedukasi SDM pengelola informasi publik
- l. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas yang menjadi masalah Masih perlu dilakukan pemetaan komunitas informasi dan komunikasi publik dengan masalah Mempersiapkan perangkat tools dan SDM untuk melakukan pemetaan komunitas informasi dan komunikasi publik sehingga akar masalahnya adalah Dokumen data komunitas informasi dan komunikasi publik dan Melaksanakan kegiatan/event Khusus terkait

- m. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi pokok masalah pentingnya penyebaran informasi terkait kebijakan dan program Pemerintah Kota Makassar dalam bentuk konten yang menarik dan kekinian dibutuhkan saran sehingga masalahnya terdapat pada Belum adanya peralatan standar podcast dan visual dengan akar masalah Pelaksanaan kegiatan yang bersifat Standar Profesional menjadi sulit dilaksanakan
4. Program Penyelenggaraan Statistik merupakan Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik, Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Adapun permasalahan yang dihadapi, yaitu:
- a. Statistik harus memiliki nilai kualitas sehingga membutuhkan waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden.
 - b. Ketersediaan dukungan dari produsen SKPD, sehingga menyebabkan keterlambatan publikasi data.
 - c. Data sektoral yang beragam, tidak terpadu, belum terintegrasi masih tersebar di masing-masing SKPD.
 - d. Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM bidang statistik, serta Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai.
 - e. Masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan khususnya melalui media massa lokal maupun jaringan nasional dan Perlunya analisis berbasis teknologi terhadap berita dan informasi yang berkembang di media cetak, elektronik, maupun sosial.
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi terdapat kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan permasalahan sebagai berikut :
- a. Belum tersedianya dokumen keamanan informasi lingkup Pemerintah Kota Makassar sehingga Dokumen keamanan informasi tidak menjadi prioritas utama dan Belum ada perhatian pemangku kebijakan terkait pentingnya keamanan Informasi

- b. Belum tersedianya SDM berkualifikasi keamanan siber yang bertugas di Bidang Persandian dan Pola karir persandian dan keamanan informasi tidak memberikan daya tarik bagi ASN
- c. Computer Security Incident Response Team (CSIRT) belum terbentuk di Pemerintah Kota Makassar, belum ada personel dan wadah yang di bertanggung jawab jika terjadi insiden keamanan siber, dan Insiden keamanan siber belum dapat di tangani
- d. Peralatan Counter Surveillance belum tersedia, mengingat Peralatan Counter Surveillance yang tidak di jual bebas dan Harga Peralatan Counter Surveillance yang relatif sangat mahal
- e. Pemanfaatan Jaring Komunikasi sandi belum maksimal dan Jaring Komunikasi Sandi perlu di upgrade untuk mengikuti perkembangan teknologi

C. RENCANA STRATEGIS

Dengan memperhatikan kondisi kota Makassar yang merupakan pintu gerbang Indonesia Bagian Timur dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil dikota Makassar dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informasi; Maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain:

1. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik memiliki makna: segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk

mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Undang-undang Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan menjamin haknya warga Negara Indonesia untuk mengakses informasi public. Indonesia juga telah mengadopsi inisiatif global ekstratif industries transparency initiative (EITI) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan instansi publik negara dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik, diperlukan adanya pemahaman dan edukasi undang-undang tersebut baik kepada kalangan masyarakat maupun bagi instansi publik yang melakukan pelayanan publik itu sendiri.

2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. Kemajuan yang pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya sistem informasi yang lemah di negara berkembang, termasuk Indonesia, mengakibatkan keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan teknologi informasi di Kota Makassar memerlukan komitmen dari semua pihak, terutama aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat luas sebagai stakeholder untuk pengembangan system yang terintegrasi dengan system lainnya sesuai dengan kebutuhan pemerintah kota Makassar terkait pelayanan public kondisi infrastruktur, hal – hal yang bersifat darurat maupun kehidupan social masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Penetapan Indikator Kinerja adanya *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak) dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan/sasaran dari setiap SKPD untuk mencapai target masing-masing indikator.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026, berdasarkan APBD Tahun 2021 yang telah disetujui oleh DPRD, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar yang merupakan perjanjian kinerja (kontrak kerja) antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Walikota dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dialokasikan pembiayaannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahannya (DPA/DPPA) Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan perjanjian kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggung jawab program dengan atasan langsung dalam hal ini Walikota dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran, beserta pernyataan Penetapan Kinerja (PK) dan Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2021.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat perjanjian kinerja pada awal tahun 2021 antara kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dengan Walikota Makassar.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel. 2.1
PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Administrasi (Citizen Charter)	Indeks kepuasan pegawai Dinas KOMINFO terhadap pelayanan Sekretariat	100%
2.	Tersedianya Infrastruktur jaringan baik kabel maupun nirkabel	Cakupan infrastruktur kelancaran arus informasi	70%
		Jumlah unit ruang publik yang terfasilitasi akses WiFi	10 titik
3.	Tersedianya Layanan Informasi Publik dan Layanan Pengaduan	Persentase SKPD menerapkan Elektronik E-Government yang terintegrasi	80%
		Persentase SKPD yang menerapkan Data Elektronik yang terintegrasi	50%
4.	Terintegrasinya Sistem Aplikasi Pemerintah	Persentase SKPD yang dokumen perencanaan dan laporan kerjanya	100%
5.	Tersedianya Layanan Informasi Publik dan Layanan Pengaduan	Persentase data dan laporan yang disusun tepat waktu	100%
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data Elektronik yang Terintegrasi	Persentase komunikasi rahasia dan daerah yang diamankan	50%
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data Elektronik yang Terintegrasi	Persentase operasional War Room	99%

Perjanjian kinerja tersebut di atas adalah wujud penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Perjanjian kinerja tahun 2021 ini merupakan penjabaran target kinerja tahunan dan merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Perjanjian kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, serta merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Selain itu hal ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai upaya memenuhi visi organisasi.

Muatan secara lengkap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar disajikan dalam Lampiran 2.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar bersama dengan walikota Makassar, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT

Adapun Program Sekertariat yang Capaian kinerjanya diukur melalui indikator kinerja utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan ASN perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	100%	100%

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung oleh sejumlah kegiatan di antaranya: (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, (5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, (6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 7.103.563.866 dengan rasio realisasi persentase sebesar 90% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.885.998.979 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Data Pegawai LPPD 2021

JUMLAH PEGAWAI PNS		JUMLAH PEGAWAI KONTRAK		JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL	JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL	JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL UMUM
LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
27	19	41	46	15	1	30

Faktor pendukung

- Adanya dukungan anggaran yang memadai dalam menjalankan program.
- Jumlah SDM Tenaga Kontrak cukup memadai.
- Dukungan peralatan kerja cukup memadai.

Faktor penghambat

- Beberapa belanja modal tidak dilaksanakan karena spesifikasi yang diinginkan tidak sesuai dengan pagu anggaran yang ada.
- Jabatan definitif untuk Kasubag Perencanaan dan Pelaporan sampai sekarang belum ada.
- Kompetensi SDM yang ada kurang mendukung untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- Dalam pengisian indikator kinerja dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan ada yang tidak dilakukan sehingga menyulitkan dalam mengukur capaian kinerja.

Tindak lanjut

- Melakukan perencanaan belanja modal yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.
- Menetapkan pejabat pelaksana tugas Kasubag Perencanaan dan Pelaporan sampai menunggu pelantikan pejabat definitif.
- Melakukan penempatan staf sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikan.
- Memperhatikan indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan pada penyusunan anggaran selanjutnya, sehingga memudahkan dalam pengukuran capaian kinerja.

2. INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Adapun Program Bidang Aplikasi Informatika yang Capaian kinerjanya diukur melalui indikator kinerja utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kota	100%	100%	100%

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kota merupakan indikator kinerja dari Program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan target kinerja tahun 2021 sebesar 100% dan telah terealisasi sebanyak 100% sehingga dapat dihitung bahwa rasio capaian presentase pada realisasi ini adalah sebanyak 100%. Realisasi pada indikator kinerja ini dikategorikan sangat tinggi di tahun 2021 ini.

$$(x = \frac{\text{Realisasi Persentase masyarakat} \dots}{\text{Target Persentase masyarakat} \dots} \times 100\%)$$

$$(x = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%) = 100\% \text{ realisasi, dari target } 100\%$$

$$\text{Atau dengan capaian } (x = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%) = 100\%$$

Program Informasi dan Komunikasi Publik didukung oleh kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai target kinerja melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 3.075.008.064,- atau dengan capaian presentase sebesar 90% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.399.177.000,-.

Berikut data desiminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP:

NO	JENIS KONTEN	TAHUN	JUMLAH
1	Video Iklan Program Pemerintah	2021	11 Video
2	Info Grafis	2021	12 Info
3	Website / Berita Online	2021	480 Berita

Data konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi:

NO	JENIS MEDIA	JENIS KONTEN	TAHUN	JUMLAH MEDIA
1	Media Penyiaran Radio	Iklan Layanan Masyarakat Dan Berita	2021	8
2	Media Penyiaran TV	Iklan Layanan Masyarakat Dan Talkshow	2021	5
3	Media Cetak	Iklan Layanan Masyarakat Dan Berita	2021	2
4	Media Online	Iklan Banner dan Berita	2021	25

Data konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota:

NO	JENIS MEDIA	TEMA KONTEN	TAHUN	JUMLAH MEDIA
1	Media Penyiaran Radio	Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Makassar Recover, Satgas Covid 19, Isolasi Apung KM Umsini, Anti Hoax, NTPD 112, Lalin Kota Makassar, Greatings Ramadhan.	2021	8
2	Media Penyiaran TV	ILM Dan Talkshow Makassar Recover, Anti Hoax, HUT Kota Makassar , Greatings Ramadhan	2021	5
3	Media Cetak	Iklan Layanan Masyarakat Dan Berita terkait HUT Kota Makassar, Makassar Recover, Greatings Ramadhan.	2021	2
4	Media Online	Pemberitaan Makassar Recover, Festival Vaksinasi, Satgas Covid 19, Isolasi Apung KM Umsini, Anti Hoax, HUT Kota Makassar, Sabtu Bersih, Lorong Wisata, Inovasi Sentuh Pustaka, Bajiki', serta berbagai kegiatan di setiap SKPD	2021	25

Data desiminasi dan layanan informasi publik:

NO	JENIS KONTEN	TAHUN	JUMLAH
1	Website PPID Kota Makassar	2021	3 (Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat)

Faktor pendukung

- Jumlah Tenaga Kontrak yang cukup memadai.
- Adanya dukungan dan perhatian Pimpinan terkait Program Informasi dan Komunikasi Publik.
- Kerjasama dan koordinasi antara Staf dengan Pimpinan cukup baik.

Faktor penghambat

- Jumlah anggaran yang tidak memadai, khususnya anggaran media.
- Jabatan definitif untuk Kepala Seksi Komunikasi Sosial kosong.
- Kompetensi pengelola website kurang mendukung.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum berjalan sebagaimana mestinya.

Tindak lanjut

- Untuk Rencana Kerja di Tahun 2022, anggaran media sudah ditingkatkan.
- Menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Seksi Komunikasi Sosial sampai menunggu pelantikan pejabat definitif.
- Mencari atau menetapkan kedepannya tenaga ahli di bidang pengembangan website.
- Membuat Surat Keputusan Pengelola PPID Utama dan Pembantu sehingga kegiatan pengelolaan informasi daerah dapat berjalan.

3. APLIKASI DAN INFORMATIKA

Adapun Program Bidang Aplikasi dan Informatika yang capaian kinerjanya diukur melalui indikator kinerja utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
-------------------	--------	-----------	-----------

Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dan Terintegrasi	100%	95%	95%
--	------	-----	-----

Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi merupakan indikator kinerja dari Program Aplikasi dan Informatika, dengan target kinerja tahun 2021 sebesar 100% dan telah terealisasi sebanyak 95% sehingga dapat dihitung bahwa rasio capaian persentase pada realisasi ini adalah sebanyak 95%. Realisasi pada indikator kinerja ini dikategorikan tinggi di tahun 2021 ini.

$$(x = \frac{\text{Realisasi persentase layanan publik....}}{\text{Target persentase layanan publik....}} \times 100\%)$$

$$(x = \frac{95\%}{100\%} \times 100\%) = 95\% \text{ realisasi, dari target } 100\%$$

Atau dengan capaian $(x = \frac{95\%}{100\%} \times 100\%) = 95\%$

Program Aplikasi dan Informatika didukung oleh kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mencapai target kinerja melalui Program Aplikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 25.180.316.552 atau dengan capaian persentase sebesar 80% dari alokasi anggaran sebesar Rp 31.297.802.500.

Faktor pendorong:

- SDM yang berlatar belakang IT cukup memadai
- Dukungan sumber anggaran yang cukup memadai
- Program Aplikasi dan Informatika menjadi program prioritas Kepala Daerah.

Faktor Penghambat

- Adanya gagal tender untuk pengadaan CCTV Surveillance dikarenakan pemenang lelang mundur dari pekerjaan.
- Barang belanja modal yang diinginkan dipesan dari luar negeri serta waktu pengerjaan yang sempit.
- Jabatan definitif untuk Kepala Seksi Standarisasi Monitoring dan Evaluasi kosong.

Tindak Lanjut:

- Melakukan kegiatan tender lebih awal di tahun anggaran 2022.
- Menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi sampai menunggu pelantikan pejabat defenitif.
- Menyusun anggaran belanja modal dengan memperhatikan spesifikasi barang yang dibutuhkan.

4. PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

Adapun Program Bidang Pengolahan data elektronik diukur melalui indikator kinerja utama sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	100%	100%	100%

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja yaitu tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, indikator ini dihitung berdasarkan ada tidaknya tersedia sistem data statistik yang terintegrasi.

Target kinerja tahun 2021 sebesar 100% dan telah terealisasi sebanyak 100% sehingga dapat dihitung bahwa rasio capaian presentase pada realisasi ini adalah sebanyak 100%. Realisasi pada indikator kinerja ini dikategorikan sangat tinggi di tahun 2021 ini.

$$(x = \frac{\text{Realisasi tersedianya sistem data dan statistik yg terintegrasi}}{\text{Target tersedianya sistem data dan statistik yg terintegrasi}} \times 100\%)$$

$$(x = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%) = 100\% \text{ realisasi, dari target } 100\%$$

$$\text{Atau dengan capaian } (x = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%) = 100\%$$

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral didukung oleh 1 (Satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya kegiatan tersebut terdiri dari 2 (Dua) sub kegiatan yaitu (1) Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral, (2) Membangun metadata statistik sektoral.

Sistem Statistik di Bidang Pengolahan Data Elektronik yaitu:

No.	Sistem Statistik	Link
1	Portal Metadata Statistik Sektoral	http://metadata.makassarkota.go.id/
2	Buku Potret Kota Makassar 2021	https://play.google.com/store/books/details/Dinas_Komunikasi_dan_Informatika_Kota_Makassar_Pot?id=i6JREAAAQBAJ
3	Buku Profil Kota Makassar 2021	https://play.google.com/store/books/details/Dinas_Komunikasi_dan_Informatika_Kota_Makassar_Pro?id=sgRSEAAAQBAJ

Untuk mencapai target kinerja melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 442.777.540 atau dengan capaian presentase sebesar 95% dari alokasi anggaran sebesar Rp 464.986.300

➤ Faktor Pendukung

- a. Sudah ada SDM berlatar belakang statistik yang ditempatkan di Bidang Pengelola Data Elektronik.
- b. Penggunaan sistem SIPD cukup memudahkan dalam melakukan penganggaran meskipun harus melakukan penyesuain-penyemuain baru.

➤ Faktor Penghambat

- a. Akibat Pandemi Covid-19 hampir semua kegiatan mengalami perlambatan dalam pencapaian target yang ditentukan.

- b. Jabatan defenitif untuk Kepala Seksi Kompilasi dan Integrasi Data serta Kepala Seksi Statistik masih kosong.

➤ Tindak lanjut

- a. Melakukan penyusunan alur kas berdasarkan prioritas program yang akan dilaksanakan lebih dulu.
- b. Menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kompilasi dan Integrasi Data serta Kepala Seksi Statistik sampai menunggu pelantikan pejabat definitif.

5. PERSANDIAN

Adapun Program Bidang Persandian yang Capaian kerjanya diukur melalui indikator kinerja utama sebagai berikut:

Indeks	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Keamanan Informasi (Indeks KAMI) merupakan indikator
(Indeks	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMMI)	Level 1	Level 1	100%	

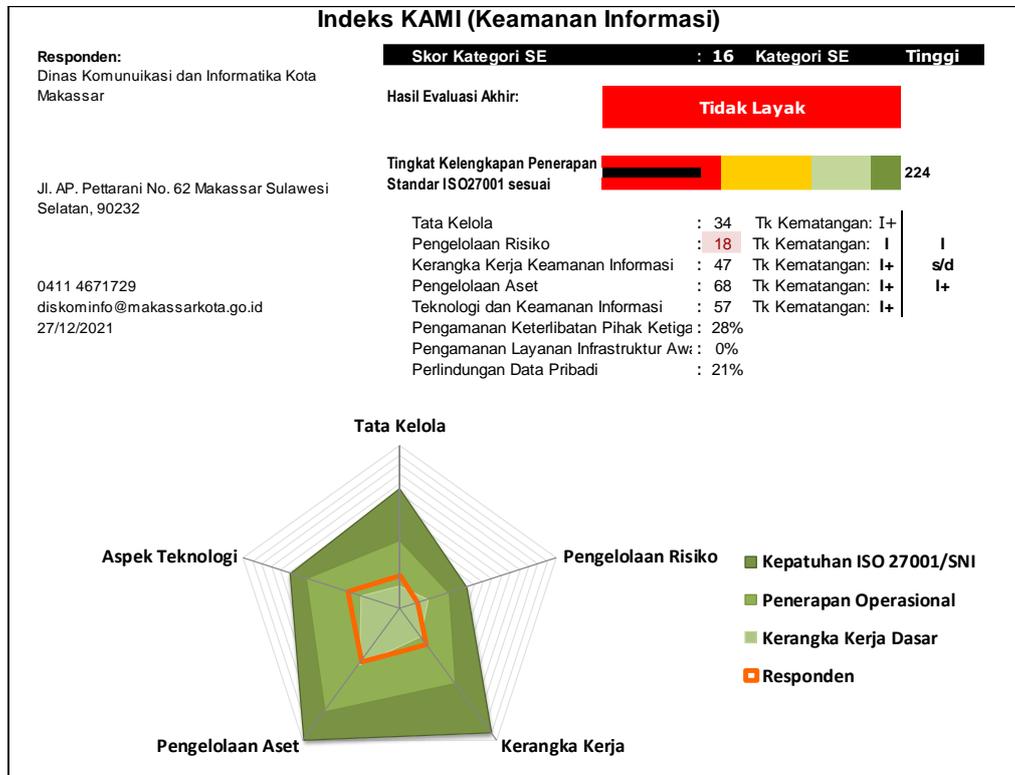
kinerja dari Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan target kinerja tahun 2021 sebesar Level 1 dan telah terealisasi sebanyak Level 1 sehingga dapat dihitung bahwa rasio capaian presentase pada realisasi ini adalah sebanyak 100%. Realisasi pada indikator kinerja ini dikategorikan sangat tinggi di tahun 2021 ini.

$$\begin{aligned}
 (x &= \frac{\text{Realisasi Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)}}{\text{Target Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)}} \times 100\%) \\
 (x &= \frac{\text{Level 1}}{\text{Level 1}} \times 100\%) = 100\% \text{ realisasi, dari target } 100\% \\
 \text{Atau dengan capaian } (x &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%) = 100\%
 \end{aligned}$$

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai target kinerja melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah

merealisasikan anggaran sebesar Rp 160.912.686 atau dengan capaian persentase sebesar 96% dari alokasi anggaran sebesar Rp 168.104.375



➤ **Faktor Pendukung**

- a. Untuk staf yang memiliki kualifikasi ahli sandi sudah mempunyai 4 orang.
- b. Adanya dukungan koordinasi dengan Bidang Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- c. Adanya kekompakan dalam hal berkegiatan di Bidang Persandian.

➤ **Faktor Penghambat**

- a. Tidak ada staf berlatar belakang IT yang ditempatkan di Bidang Persandian.
- b. Dukungan anggaran yang kurang memadai dalam melaksanakan kegiatan keamanan informasi.

➤ **Tindak Lanjut**

- a. Mengusulkan formasi CPNS atau staf ahli terkait keamanan informasi untuk ditempatkan di Bidang Persandian.
- b. Melakukan pengusulan anggaran yang memadai untuk Rencana Kerja Tahun 2022.

B. REALISASI ANGGARAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Capaian
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.885.998.979	7.103.563.866	90
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.088.000	121.102.000	97
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.152.960.654	5.822.364.865	95
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.000.000	91.220.000	88
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	469.148.765	303.422.956	65
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	656.917.600	458.044.996	70
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	377.883.960	307.409.049	81
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.399.177.000	3.075.008.064	90
1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.399.177.000	3.075.008.064	90
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	31.297.802.500	25.180.316.552	80

1.	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31.297.802.500	25.180.316.552	80
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	464.986.300	442.777.540	95
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	464.986.300	442.777.540	95
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	168.104.375	160.912.686	96
1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	168.104.375	160.912.686	96
	TOTAL	43.216.069.154	35.962.578.708	83

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar berkaitan dengan penyelenggaraan Anggaran di tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk mencapai tiap-tiap tujuan Rencana kerja 2021 dikategorikan sangat baik. Berikut uraian persentase rasio capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program ini terdiri dari 6 (Enam) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 7.885.998.979,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp 7.103.563.866,- (90%). Indikator programnya adalah presentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah. Rata-rata capaian kinerja 80% dengan predikat kinerja tinggi. Adapun sub kegiatannya meliputi:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, indikator output kegiatannya adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun. Pagu anggaran Rp. 31.519.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 31.519.000,- (100%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA –SKPD, indikator output kegiatannya adalah Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Pagu anggaran Rp. 8.351.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV Rp. 8.351.000,- (100%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
- c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD, Jumlah Koordinasi Pagu anggaran adalah Rp.10.761.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV Rp. 10.761.000,- (100%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
- d. Kooordinasi Penyusunan DPA-SKPD,. Pagu anggaran Rp. 9.941.000,-dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 9.941.000,- (100%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
- e. Kooordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, indikator output kegiatannya adalah Jumlah Kooordinasi Penyusunan DPA-SKPD. Pagu anggaran Rp.

- 9.691.000,-dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 8.791.000,- (91%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
- f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dengan Pagu anggaran Rp 43.691.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 41.991.000,- (96%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan 100%.
- g. Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Pagu anggaran Rp 11.134.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 9.754.000,- (88%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100%.
- h. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikator output kegiatannya adalah Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan. Pagu anggaran Rp. 5.721.630.654,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 5.425.044.865,- (95%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
- i. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Pagu anggaran Rp. 335.530.000,-dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 301.77.000,- (90%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
- j. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, indikator outputnya adalah Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD. Pagu anggaran Rp. 95.800.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 95.550.000,- (100%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
- k. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, indikator kegiatannya adalah Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya. Pagu anggaran Rp. 87.000.000,-dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 83.720.000,- (96%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 97%.
- l. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, indikator kegiatannya adalah Jumlah Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Pagu anggaran Rp. 17.000.000,-dengan proporsi

- realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 7.500.000,- (44%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 17%.
- m. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Pagu anggaran Rp. 139.281.250,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 82.327.000,- (51%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 58%.
 - n. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pagu anggaran Rp. 4.688.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 0(0%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 0%
 - o. Penyediaan bahan logistik kantor Kantor. Pagu anggaran Rp. 185.998.515,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 140.287.000,- (75%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 80%.
 - p. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Pagu anggaran Rp. 55.671.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 21.709.000,- (39%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 57%
 - q. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Pagu anggaran Rp. 17.560.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 17.220.000,- (98%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%
 - r. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Pagu anggaran Rp. 44.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 41.879.956,- (95%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 6%
 - s. Penyediaan jasa surat menyurat. Pagu anggaran Rp. 355.050.600,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 319.226.028,- (90%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 117%
 - t. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pagu anggaran Rp. 268.716.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 109.693.968,- (41%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%
 - u. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu anggaran Rp. 33.151.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 20.496.000,- (88%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%

- v. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Pagu anggaran Rp. 17.375.400,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 16.035.600,- (92%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%
- w. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pagu anggaran Rp. 265.728.560,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 239.258.449,- (89%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 80%
- x. Pemeliharaan Mebel Pagu anggaran Rp. 4.960.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 4.080.000,- (82%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%
- y. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya Pagu anggaran Rp. 6.270.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 5.890.000,- (94%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%
- z. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu anggaran Rp. 79.550.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 42.145.000,- (53%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 51%

2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Program informasi dan komunikasi publik Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp.3.399.177.000,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 3.075.008.068,- (90%) Indikator programnya adalah Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kota makassar. Rata-rata capaian kinerja 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Adapun sub kegiatannya meliputi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, indikator output kegiatannya adalah Penyediaan Kebijakan Teknis Informasi. Pagu anggaran Rp. 227.660.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 225.460.000,- (99%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.

- b. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, indikator output kegiatannya adalah Jumlah kegiatan pantauan aspirasi publik. Pagu anggaran Rp. 148.576.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 145.688.000,- (98%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
- c. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, indikator output kegiatannya adalah Jumlah Data yang terupload. Pagu anggaran Rp. 276.556.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 274.435.000,- (99%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
- d. Pelayanan Informasi Publik, indikator output kegiatannya adalah Jumlah Informasi Yang disebarakan Kepada Masyarakat. Pagu anggaran Rp. 1.092.264.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 1.042.864.000,- (95%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.
- e. Layanan Hubungan Media, indikator output kegiatannya adalah Jumlah media yang menjalin kerja sama . Pagu anggaran Rp 1.440.803.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 1.200.803.000,- (83%) . Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%
- f. Penguatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik, indikator kegiatannya adalah Jumlah Komunitas Sumber daya kehumasan yang dikoordinasikan. Pagu anggaran Rp. 213.318.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 185.758.064,- (87%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.

3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Program aplikasi informatika Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 31.297.802.500,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp 25.180.316.552,- (80%), indikator kegiatannya adalah Persentase layanan publik yang disenggalarkan secara online dan terintegrasi Rata-rata capaian kinerja 65% dengan predikat kinerja Sedang. Adapun sub kegiatannya meliputi :

- a. Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, indikator output kegiatannya adalah Jumlah dokumen tata kelola IT. Pagu anggaran Rp. 38.037.500,- dengan

proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp.0,- (0%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 0%

- b. Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah indikator output kegiatannya adalah Tercapainya optimalisasi layanan OP Pagu anggaran Rp. 13.635.692.500,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 12.771.716.484,- (94%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 111%.
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi data dan informasi elektronik indikator output kegiatannya adalah Integrasi data yang terverifikasi Pagu anggaran Rp. 633.984.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 278.157.568,- (44%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 40%
- d. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik indikator output kegiatannya adalah Aplikasi yang terpublikasi Pagu anggaran Rp. 18.378.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 0,- (0%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 0%
- e. Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah indikator output kegiatannya adalah Pembuatan regulasi yang diakomodasi Pagu anggaran Rp. 124.725.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 0,- (0%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 0%
- f. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas Pagu anggaran Rp. 64.275.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 0 (0%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 0%
- g. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah Pagu anggaran Rp. 16.782.710.500,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 12.130.442.500,- (72%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Program penyelenggaraan statistik sektoral Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp 464.986.300,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp 442.777.540,- (95%), indikator kegiatannya adalah persentase data pembangunan

daerah yang tepat waktu Rata-rata capaian kinerja 100% dengan predikat kinerja rendah. Adapun sub kegiatannya meliputi:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral Pagu anggaran Rp. 306.137.400,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 304.772.176,- (100%). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%
- b. Membangun metadata statistik sektoral Pagu anggaran Rp. 158.848.900,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 138.005.364,- (87%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp 168.104.375,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp 160.912.686,- (96%), indikator kegiatannya adalah persentase data pembangunan daerah yang tepat waktu Rata-rata capaian kinerja 100% dengan predikat kinerja rendah. Adapun sub kegiatannya meliputi:

- a. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota Pagu anggaran Rp. 8.349.000,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp.8.275.000,- (99%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah 100%
- b. Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik Pagu anggaran Rp. 159.755.375,- dengan proporsi realisasi anggaran hingga triwulan IV sebesar Rp. 152.637.686,- (96%) Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100%

Demikian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar tahun 2021 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. ISMAIL HAJIALI, SE., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. H. MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO

Jabatan : WALIKOTA MAKASSAR

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama bernyanyi akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. H. MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO

ISMAIL HAJIALI,SE.,M.Si
NIP. 19610828 198503 1 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Administrasi (Citizen Charter)	Indeks kepuasan pegawai Dinas KOMINFO terhadap pelayanan Sekretariat	100%
2.	Tersedianya Infrastruktur jaringan baik kabel maupun nirkabel	Cakupan infrastruktur kelancaran arus informasi	70%
		Jumlah unit ruang publik yang terfasilitasi akses WiFi	10 titik
3.	Tersedianya Layanan Informasi Publik dan Layanan Pengaduan	Persentase SKPD menerapkan Elektronik E-Government yang terintegrasi	80%
		Persentase SKPD yang menerapkan Data Elektronik yang terintegrasi	50%
4.	Terintegrasinya Sistem Aplikasi Pemerintah	Persentase SKPD yang dokumen perencanaan dan laporan kerjanya dipublikasikan di media	100%
5.	Tersedianya Layanan Informasi Publik dan Layanan Pengaduan	Persentase data dan laporan yang disusun tepat waktu	100%
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data Elektronik yang Terintegrasi	Persentase komunikasi rahasia dan daerah yang diamankan	50%
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data Elektronik yang Terintegrasi	Persentase operasional War Room	99%

Program

	Anggaran	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 125.088.000	APBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.437.697.860	APBD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 317.000.000	APBD
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 604.961.265	APBD
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 656.557.600	APBD
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 373.271.300	APBD
7. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 3.399.457.000	APBD
8. Program Aplikasi Informatika	Rp. 13.356.474.300	APBD
9. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 464.328.300	APBD
10. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 204.164.375	APBD
	Rp. 26.939.000.000	

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. H. MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO

Dr. ISMAIL HAJIALI, SE., M.Si
NIP. 19610828 198503 1 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP.,M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ISMAIL HAJIALI,SE.,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr.ISMAIL HAJIALI,SE.,M.Si
NIP. 19610828 198503 1 020

I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP,M.Si
NIP.19770208 199511 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**PERANGKAT DAERAH**

No	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan	65 Persen
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Jenis
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Jenis

Program**Anggaran****Ket**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah . Kabupaten/Kota	Rp. 125.088.000	APBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah . Kabupaten/Kota	Rp. 7.437.697.860	APBD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah . Kabupaten/Kota	Rp. 317.000.000	APBD
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah . Kabupaten/Kota	Rp. 604.961.265	APBD
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah . Kabupaten/Kota	Rp. 656.557.600	APBD
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah . Kabupaten/Kota	<u>Rp. 373.271.300</u> Rp. 9.514.576.025	APBD

Makassar, 28 Januari 2021

Kepala Dinas,**Sekertaris,****Dr.ISMAIL HAJIALI,SE.,M.Si**
NIP. 19610828 198503 1 020**I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP.,M.Si**
NIP.19770208 199511 1 00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahma Jaya, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP.,M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP.,M.Si
NIP.19770208 199511 1 002

Ahma Jaya, SE
NIP. 19650716 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	145 Pasang
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan pelatihan formal	12 Orang

Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Rp. 87.000.000	APBD
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 230.000.000	APBD
	Rp. 317.000.000	APBD

Makassar, 01 Maret 2021

Sekretaris,

Kasubag Umum & Kepegawaian

I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP,M.Si
NIP. 19770208 199511 1 002

Ahma Jaya, SE
NIP. 19650716 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahma Jaya, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP.,M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 28 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP.,M.Si
NIP.19770208 199511 1 002

Ahma Jaya, SE
NIP. 19650716 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**PERANGKAT DAERAH**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kantor yang diadakan	6 jenis
		Jumlah alat studio yang diadakan	0 unit
		Jumlah komputer yang diadakan	3 jenis
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang diadakan	11 Unit
3.	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia	0 unit
		Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia	3 jenis
		Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia	22 jenis
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia	7 jenis
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	4 jenis
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	62 kali

Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 139.281.250	APBD
2. Penyediaan Alat Rumah Tangga	Rp. 4.688.000	APBD
3. Penyediaan Bahan logistik Kantor	Rp. 198.263.015	APBD
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan	Rp. 17.560.000	APBD
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. <u>201.500.000</u>	APBD
	Rp. 359.792.265	APBD

Makassar, 01 Maret 2021

Sekertaris,

Kasubag Umum & Kepegawaian**I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP.,M.Si**
NIP. 19770208 199511 1 002**Ahma Jaya, SE**
NIP. 19650716 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahma Jaya, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP ,M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 28 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP.,M.Si
NIP.19770208 199511 1 002

Ahma Jaya, SE
NIP. 19650716 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**PERANGKAT DAERAH**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang tersedia	1000 surat
		Terhubungnya jasa pengiriman surat	12 bulan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa listrik telepon dan air yang tersedia	3 jenis
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	4 jenis

Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 355.050.600	APBD
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air Dan Listrik	Rp. 268.716.000	APBD
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<u>Rp. 32.791.000</u>	APBD
	Rp. 656.557.600	APBD

Makassar, 01 Maret 2021

Sekertaris,

Kasubag Umum & Kepegawaian**I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP.,M.Si**
NIP. 19770208 199511 1 002**Ahma Jaya, SE**
NIP. 19650716 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusran, SE., M. Ak

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP.,M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP.,M.Si
NIP.19770208 199511 1 002

Yusran, SE., M. Ak
NIP. 19860305 201001 1 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai menerima gaji / tunjangan	12 bulan
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa pengelolaan keuangan SKPD	7 orang
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan laporan akhir tahun serta perhitungan penyusutan ass	2 dokumen

Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran

Rp. 7.041.777.860

Ket

APBD

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian

Rp. 300.120.000

APBD

/verifikasi Keuangan SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran

Rp. 95.800.000

APBD

Rp. 7.437.697.860 APBD

Makassar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP.,M.Si
NIP.19770208 199511 1 002

Yusran, SE., M.Ak
NIP. 19860305 201001 1 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Muh.Fara Kessi.S.STP.,MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP.,M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassa, 30 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP.,M.Si
NIP.19770208 199511 1 002

Andi Muh Fara Kessi S.STP.MM
NIP. 19810510 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen RENJA perubahan SKPD yang disusun	1 dokumen
		Tersedianya dokumen RENJA SKPD yang disusun	1 dokumen
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD	1 dokumen
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD	1 dokumen
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan semesteran barang barang milik daerah	1 dokumen
		Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perjanjian kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen
		Tersedianya rencana kerja SKPD yang dikendalikan dan dievaluasi	1 dokumen

Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 31.519.000	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 8.351.000	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 10.761.000	APBD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 9.941.000	APBD
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp. 9.691.000	APBD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 43.691.000	APBD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<u>Rp. 11.134.000</u>	APBD
	Rp. 125.088.000	

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP.,M.Si
NIP.19770208 199511 1 002

Andi Muh Fara Kessi S.STP.MM
NIP. 19810510 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Denny Hidayat, ST.,M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ISMAIL HAJIALI,SE.,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

ISMAIL HAJIALI,SE.,M.Si
NIP. 19610828 198503 1 020

Denny Hidayat, ST.,M.Si
NIP. 19750505 200003 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Aplikasi Informatika		

Program

1 Program Aplikasi Informatika

Anggaran

Rp. 13.651.563.000

Rp. 13.651.563.000

Ket

APBD

Makassar, 01 Maret 2021

Kepala Perangkat Daerah

Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Dr. ISMAIL HAJIALI, SE., M.Si
NIP. 19610828 198503 1 020

Denny Hidayat, ST., M.Si
NIP. 19750505 200003 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Mery Katanni

Jabatan : Kasi. Pengembangan dan Telekomunikasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Denny Hidayat, ST.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Denny Hidayat, ST.,M.Si
NIP. 19750505 200003 1 009

Dra. Mery Katanni
NIP. 19640120 199303 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata kelola IT	4 dokumen
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		

Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Penatalaksanaan dan pengawasan e government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 38.037.500	APBD
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	<u>Rp. 482.484.000</u>	APBD
	Rp. 520.521.500	APBD

Makassar, 01 Maret 2021

Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Kasi. Pengembangan dan Telekomunikasi

Denny Hidayat, ST.,M.Si
NIP. 19750505 200003 1 009

Dra. Mery Katanni
NIP. 19640120 199303 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Jusman. S.Kel., M.Si

Jabatan : Kasi. Aplikasi dan Telematika

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Denny Hidayat, ST.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Denny Hidayat, ST.,M.Si
NIP. 19750505 200003 1 009

Dr. Jusman. S.Kel., M.Si
NIP. 19781231 200901 1 039

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		
2.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		
3.	Pengembangan dan pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas		

Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp. 18.378.000	APBD
2. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Rp. 124.725.000	APBD
3. Pengembangan dan pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	Rp. 64.275.000	APBD
4. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi informasi Komunikasi Pemerintah Daerah	<u>Rp. 9.846.000.000</u> Rp.10.053.378.000	APBD APBD

Makassar, 01 Maret 2021

Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Kasi. Aplikasi dan Telematika

Denny Hidayat, ST., M.Si
NIP. 19750505 200003 1 009

Dr. Jusman. S.Kel., M.Si
NIP. 19781231 200901 1 039

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Denny Hidayat, ST.,M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nursalim, S.Kom.
Jabatan : PLT. Kepala Seksi Standarisasi , Monitoring dan Evaluasi

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Denny Hidayat, ST.,M.Si
NIP. 19750505 200003 1 009

Nursalim, S.Kom.
NIP. 19750505 200003 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan dan Pengeloaan Sumber Daya Teknologi informasi Komunikasi Pemerintah Daerah		

Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Pengembangan dan Pengeloaan Sumber Daya Teknologi informasi Komunikasi Pemerintah Daerah.	<u>Rp. 9. 846.000.000</u>	APBD
	Rp. 9.846.000.000	

Makassar, 01 Maret 2021

Kepala Bidang Aplikasi Informatika

PLT. Kasi Standarisasi , Monitoring dan Evaluasi

Denny Hidayat, ST,M.Si
NIP. 19750505 200003 1 009

Nursalim, S.Kom.
NIP. 19750505 200003 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yamlikh Azikin, S.Kom., M.I.Kom

Jabatan : Kepala UPTD

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ISMAIL HAJIALI,SE.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Dr.ISMAIL HAJIALI,SE.,M.Si
NIP. 19750505 200003 1 009

Yamlikh Azikin, S.Kom., M.I.Kom
NIP. 19821204 200901 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Tercapainya optimalisasi layanan OP	90%

Kegiatan

Anggaran

Ket

1. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

Rp. 2.619.574.800

APBD

Rp. 2.619.574.800

Makassar, 01 Maret 2021

Kepala Dinas ,

Kepala UPTD ,

Dr.ISMAIL HAJIALI,SE.,M.Si
NIP. 19750505 200003 1 009

Yamlikh Azikin, S.Kom., M.I.Kom
Nip. 19821204 200901 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Ismar Gobel, S.STP., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ISMAIL HAJIALI, SE ., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Dr.ISMAIL HAJIALI,SE.,M.Si
NIP. 19610828 198503 1 020

Ade Ismar Gobel, S.STP., M.Si
NIP. 19790315 199810 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik		

Program

Anggaran

Ket

1. Program Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 3.399.457.000
Rp. 3.399.457.000

Makassar, 01 Maret 2021

Kepala Dinas ,

**Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik ,**

Dr. ISMAIL HAJIALI, SE., M.Si
NIP. 19610828 198503 1 020

Ade Ismar Gobel, S.STP., M.Si
NIP. 19790315 199810 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Ismar Gobel, S.STP., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muh. Firman
Jabatan : PLT. Kepala Seksi Komunikasi Sosial

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Ade Ismar Gobel, S.STP., M.Si
NIP. 19790315 199810 1 001

Muh. Firman
NIP. 19670909 199403 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidnag Informasi Dan Komunikasi Publik		
2.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		

Kegiatan

Anggaran

Ket

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidnag Informasi Dan Komunikasi Publik

Rp. 183.140.000

APBD

2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Rp. 298.576.000

APBD

Rp. 481.716.000

Makassar, 01 Maret 2021

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi

PLT. Kepala Seksi Komunikasi Sosial,

Ade Ismar Gobel, S.STP., M.Si
NIP. 19790315 199810 1 001

Muh. Firman
NIP. 19670909 199403 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anriany Saleng, S.IP, M.Si
Jabatan : Kasi Penyiaran dan Kemitraan Media

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ade Ismar Gobel, S.STP., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Ade Ismar Gobel, S.STP., M.Si
NIP. 19790315 199810 1 001

Anriany Saleng, S.IP, M.Si
NIP. 19741225 200502 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		
2.	Pelayanan Informasi Publik		

Kegiatan

Anggaran

Ket

1. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Rp. 396.156.000

APBD

2. Pelayanan Informasi Publik

Rp. 1.092.264.000

APBD

Rp. 1.488.420.000

Makassar, 01 Maret 2021

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik,

Kasi Penyiaran dan Kemitraan Media,

Ade Ismar Gobel, S.STP., M.Si
NIP. 19790315 199810 1 001

Anriany Saleng, S.IP, M.Si
NIP. 19741225 200502 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat, S.STP. , M.Si

Jabatan : Kasi Komunikasi Pembangunan dan Pemerintahan Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ade Ismar Gobel, S.STP., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Ade Ismar Gobel, S.STP., M.Si
NIP. 19790315 199810 1 001

Rahmat, S.STP. , M.Si
NIP. 19781231 199711 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Layanan Hubungan Media		
2.	Penguatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik		

Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Layanan Hubungan Media	Rp. 950.803.000	APBD
2. Penguatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik	Rp. 478.518.000	APBD
	Rp. 1.429.321.000	

Makassar, 01 Maret 2021

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik,

Kasi Komunikasi Pembangunan dan Pemerintahan Daerah,

Ade Ismar Gobel, S.STP., M.Si
NIP. 19790315 199810 1 001

Rahmat, S.STP. , M.Si
NIP. 19781231 199711 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhenrda,S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Data Elektronik

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ISMAIL HAJIALI,SE.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Dr.ISMAIL HAJIALI,SE.,M.Si

NIP. 19610828 198503 1 020

Suhenrda,S.STP, M.Si

NIP. 19790930 199711 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		

Program

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Anggaran

Rp. 464.328.000
Rp. 464.328.000

Ket

APBD

Makassar, 01 Maret 2021

Kepala Dinas ,

Kepala Bidang Pengelolaan data Elektronik ,

Dr.ISMAIL HAJIALI,SE.,M.Si
NIP. 19610828 198503 1 020

Suhenrda,S.STP, M.Si
NIP. 19790930 199711 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Akbal Amir, ST

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Kompilasi dan Integrasi Data

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suhendra,S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan data Elektronik

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suhenrda,S.STP, M.Si
NIP. 19790930 199711 1 001

Muhammad Akbal Amir, ST
NIP. 198404272010011023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya sistem / portal metadata statistik sektoral	1 sistem / portal

Kegiatan

1. Membangun Metadata Statistik Sektoral

Anggaran

Rp. 158.190.900

Rp. 158.190.900

Ket

APBD

Makassar, 01 Maret 2021

Kepala Bidang Pengelolaan data Elektronik,

Plt. Kepala Seksi Kompilasi dan Integrasi Data

Suhenrda,S.STP, M.Si
NIP. 19790930 199711 1 001

Muhammad Akbal Amir, ST
NIP. 19840427 201001 1 023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Subhan Gautama, SH., MH

Jabatan : Kasi Penyajian Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suhendra,S.STP.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan data Elektronik

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suhendra,S.STP.,M.Si
NIP. 19790930 199711 1 001

Subhan Gautama, SH., MH
NIP. 19660613 200701 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Presentasi ketersediaan data dalam bentuk profil Kota Makassar	1 dokumen
		Presentasi ketersediaan data dalam bentuk potret Kota Makassar	1 dokumen

Kegiatan

Anggaran

Ket

1. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp. 306.137.400	APBD
	Rp. 306.137.400	

Makassar, 01 Maret 2021

Kepala Bidang Pengelolaan data Elektronik,

Kasi Penyajian Informasi,

Suhendra,S.STP.,M.Si
NIP. 19790930 199711 1 001

Subhan Gautama, SH., MH
NIP. 19660613 200701 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Zulkarnain, ST

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Statistik

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suhendra,S.STP.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan data Elektronik

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suhendra,S.STP.,M.Si
NIP. 19790930 199711 1 001

Andi Zulkarnain, ST
NIP. 19850907 201503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Presentasi ketersediaan data dalam bentuk profil Kota Makassar	1 dokumen
		Presentasi ketersediaan data dalam bentuk potret Kota Makassar	1 dokumen

Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp. 306.137.400	APBD
	Rp. 306.137.400	

Makassar, 30 Januari 2020

Kepala Bidang Pengelolaan data Elektronik,

Plt. Kepala Seksi Statistik

Suhendra,S.STP.,M.Si
NIP. 19790930 199711 1 001

Andi Zulkarnain, ST
NIP. 19850907 201503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Abram Lululangi, S.I.P

Jabatan : Kepala Bidang Persandian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. ISMAIL HAJIALI, SE ., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Dr.ISMAIL HAJIALI,SE.,M.Si
NIP. 19610828 198503 1 020

H. Abram Lululangi, S.I.P
NIP. 19710721 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks keamanan informasi (Indeks KAMI)	1 level

Program

Anggaran

Ket

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Rp. 204.164.375

APBD

Rp. 204.164.375

Makassar, 01 Maret 2021

Kepala Dinas ,

Kepala Bidang Persandian ,

Dr. ISMAIL HAJIALISE.,M.Si
NIP. 19610828 198503 1 020

H. Abram Lululangi, S.I.P
NIP. 19710721 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Musdalifah
Jabatan : Kasi Tata Kelola Persandian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Abram Lululangi, S.I.P
Jabatan : Kepala Bidang Persandian

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

H. Abram Lululangi, S.I.P
NIP. 19710721 199101 1 001

Dra. Musdalifah
NIP. 19670927 199303 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelaksanaan Kemaanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah layanan kemaanan informasi	3 layanan

Kegiatan

1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Anggaran

Rp. 195.815.375

Rp. 195.815.375

Ket

APBD

Makassar, 01 Maret 2021

Kepala Bidang Persandian,

Kasi Tata Kelola Persandian,

H. Abram Lululangi, S.I.P
NIP. 19710721 199101 1 001

Dra. Musdalifah
NIP. 19670927 199303 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridwan, ST

Jabatan : Kasi Operasional Pengamanan Persandian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Abram Lululangi, S.I.P

Jabatan : Kepala Bidang Persandian

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

H. Abram Lululangi, S.I.P
NIP. 19710721 199101 1 001

Ridwan, ST
NIP. 19651231 199112 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah layanan keamanan informasi	3 layanan

Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	<u>Rp. 195.815.375</u> Rp. 195.815.375	APBD

Makassar, 01 Maret 2021

Kepala Bidang Persandian,

Kasi Operasional Pengamanan Persandian,

H. Abram Lululangi, S.I.P
NIP. 19710721 199101 1 001

Ridwan, ST
NIP. 19651231 199112 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adam, S.Sos

Jabatan : PLT. Kasi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Abram Lululangi, S.I.P

Jabatan : Kepala Bidang Persandian

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

H. Abram Lululangi, S.I.P
NIP. 19710721 199101 1 001

Adam, S.Sos
NIP. 19790715 2000411 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen keamanan informasi	1 dokumen

Kegiatan

Anggaran

Ket

1. Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Rp. 8.349.000

Rp. 8.349.000

Makassar, 01 Maret 2021

Kepala Bidang Persandian,

**PLT. Kasi Pengawasan dan
Evaluasi Penyelenggaraan
Persandian,**

H. Abram Lululangi, S.I.P
NIP. 19710721 199101 1 001

Adam, S.Sos
NIP. 19790715 2000411 1 001

PERJANJIAN KINERJA



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA MAKASSAR

TAHUN 2021